



MIGRASI ROHINGYA: TANTANGAN INTEGRASI SOSIAL DAN EKONOMI DI NEGARA PENERIMA

**Cinta Prasasti¹, Suci Wheli Melvia², Muhammad Irwan Sahrudin Nasution³,
Ricu Sidiq⁴, Lister Eva Simangunsong⁵, Muhammad Ihsan Syahaf Nasution⁶**
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan,
Indonesia¹²³⁴⁵⁶

cintaprasasti41@gmail.com¹, suciwhelimelvia23@gmail.com²,
irwannasution789@gmail.com³, ricusidiq@unimed.ac.id⁴, listereva@unimed.ac.id⁵,
muhammadihsansyahaf@unimed.ac.id⁶

Accepted: 2 May 2024

Published: 14 Juli 2024

Abstract

Rohingya migration has become a complex challenge that requires in-depth understanding and a holistic response from various relevant parties. In this context, this article discusses various aspects that influence the social, economic and ecological integration of Rohingya migrants in receiving countries, with a special focus on Indonesia. The research method used is a qualitative approach with descriptive methods to explore the phenomenon of Rohingya migration and the challenges of social and economic integration in receiving countries. The descriptive method was chosen because the focus of this research is to describe and explain complex situations from an in-depth and comprehensive perspective. The data collected in this research is descriptive, including words, images and information from various sources, such as books, scientific journals and previous research that are relevant to the topic under study. The results of this research show that there are several main challenges faced by Rohingya migrants, including limited access to education, health services and employment, as well as social discrimination and stigmatization. Apart from that, unclear legal status, cultural and religious differences, as well as political and humanitarian instability also affect their integration process. In addition, this article also describes the environmental impacts of Rohingya migration and the importance of considering ecological factors in natural resource management and infrastructure development. To address these challenges, cross-sectoral and cross-institutional collaboration is key, with a focus on inclusive approaches, human rights protection and environmental sustainability. Diplomatic efforts are also important in resolving the root causes of the Rohingya crisis in their home country. With strong cooperation and commitment to holistic solutions, Indonesia has the potential to be a leader in responding to the challenges of social, economic and ecological integration in the context of Rohingya migration.

Key words: *Rohingya, migration, social integration, economy*

How to Cite: Prasasti. C. Et. al.(2024). Migrasi Rohingya: Tantangan Integrasi Sosial dan Ekonomi Negara Penerima. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (273-281)

*Corresponding author:
cintaprasasti@gmail.com

ISSN 2460-5786(Print)
ISSN 2684-9607(Online)

INTRODUCTION

Isu pengungsi, terutama yang melintasi batas negara, tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab negara asal atau negara penerima. Pengungsian lintas batas dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Banyak korban telah muncul karena keterlambatan atau ketidakadaan pertolongan bagi para pengungsi, serta karena pelanggaran terhadap hak asasi mereka, termasuk tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap mereka. Krisis kemanusiaan yang melibatkan Rohingya telah menjadi sorotan dunia dalam beberapa tahun terakhir. Rohingya, kelompok etnis minoritas yang mayoritas Muslim, berasal dari negara bagian Rakhine di Myanmar, telah mengalami persekusi, kekerasan, dan pengucilan sistematis oleh pemerintah dan masyarakat mayoritas Buddhanya. Kekerasan ini telah memaksa jutaan Rohingya untuk melarikan diri ke negara-negara tetangga dalam upaya untuk menyelamatkan diri dan keluarga mereka (Ikapi & Parthiana, 2015).

Salah satu fenomena yang berkembang dari krisis ini adalah migrasi Rohingya ke negara-negara penerima, seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Negara-negara ini, meskipun telah memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan sementara kepada para pengungsi Rohingya, dihadapkan pada tantangan besar dalam mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat dan ekonomi lokal. Para pengungsi masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur. Namun, kebanyakan masuk dari jalur laut. Saat ini para pengungsi Rohingya menyebar di sejumlah daerah di Tanah Air. Terkait dengan masuknya pengungsi ke Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara, Indonesia, menurut data per tanggal 10 - 25 Mei 2015, telah menampung sekitar 1809 pengungsi dengan 1713 pengungsi berada di Aceh sedangkan 96 lainnya berada di Medan. Dari jumlah 1809 pengungsi tersebut, 1004 pengungsi merupakan asal Rohingya sedangkan 805 lainnya merupakan pengungsi asal Bangladesh (AIRLANGGA, 2018).

Dalam Statuta UNHCR tahun 1950 dijelaskan bahwa semua negara, termasuk yang belum meratifikasi Konvensi pengungsi, diwajibkan untuk menghormati standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari Hukum Internasional umum.

Konvensi tersebut telah menjadi prinsip hukum yang tidak dapat diabaikan dan tidak seorang pun dapat dipulangkan ke wilayah di mana nyawa atau kebebasannya terancam. Di Indonesia, meskipun negara ini belum menjadi pihak dalam Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967, penanganan pengungsi diserahkan kepada UNHCR, yang bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan dalam Statuta tahun 1950 (Fitriyadi & Latukau, 2020).

UNHCR memiliki prosedur bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bentuk perlindungan internasional. Sebagai subjek hukum internasional, UNHCR termasuk dalam organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam konteks Hukum Internasional baik secara regional maupun universal. Organisasi internasional ini, yang beroperasi untuk menyediakan layanan publik internasional, memiliki signifikansi dalam membangun Hukum Internasional karena memiliki personalitas hukumnya sendiri yang terpisah dari negara-negara yang menjadi anggotanya. Dengan demikian, organisasi-organisasi internasional telah menjadi sumber otoritas dalam Hukum Internasional yang mandiri (Fitriyadi & Latukau, 2020).

Integrasi sosial dan ekonomi adalah aspek krusial yang harus dipertimbangkan dalam penanganan krisis pengungsi. Migrasi Rohingya menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dalam mencari kedamaian, keamanan, dan keberlanjutan hidup baru di negara penerima. Tantangan tersebut termasuk ketidakstabilan politik, ketegangan antar-etnis, perbedaan budaya dan agama, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta ketidakpastian hukum terkait status pengungsi. Fenomena imigran saat ini cukup membuat keberadaan mereka diibaratkan pedang bermata dua yang satu sisi dibutuhkan satu sisi tidak diinginkan. Mereka (imigran) bermigrasi karena berbagai alasan, yang paling utama adalah masalah ekonomi dan masalah keamanan. Tidak bisa dipungkiri, banyak negara yang gagal dalam menjamin keamanan diri penduduknya dan juga keberlangsungan ekonomi yang kuat. Sehingga pilihan untuk bermigrasi menjadi satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan diri mereka dan juga keluarga tercinta (Fauzan Alamari, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, 2016) menjelaskan bahwa Ada setidaknya dua penjelasan, pertama, masyarakat Rohingya dianggap sebagai kelompok marginal dalam kerangka kehidupan politik, ekonomi dan sosial orang Myanmar. Ini berarti, masyarakat Rohingya akan terus terpinggirkan dari arus pembangunan baik dari aspek agama, budaya, politik, ekonomi, administrasi dan pendidikan. Perbedaan agama menjadi antara garis penentu dalam melihat status pribumi oleh karena orang Rohingya menganut agama Islam dibandingkan kelompok masyarakat lain yang beragama Buddha sampai menyebabkan posisi Rohingya sebagai bukan pribumi berkelanjutan. Kedua, selain status pribumi orang Rohingya juga bukan warga negara. Mereka tidak dilihat sebagai warga Myanmar sampai menyebabkan status mereka terombang-ambing. Mereka mengungsi di negara sendiri meskipun telah menetap di Arakan sejak puluhan generasi. Berbagai rupa bentuk strategi dilakukan untuk menyangkal status dan posisi orang Rohingya. Ini melalui keberadaan penempatan tentara di wilayah Arakan, menambah jumlah pegawai tinggi tentara keturunan bukan Rohingya dan sebagainya. bahkan, ada juga kasus-kasus kekerasan dan penindasan termasuk merampas harta benda milik orang Rohingya, rumah, tanah dan sebagainya. Tanpa status warga negara, maka orang Rohingya sebenarnya seolah-olah menjadi penumpang di tanah milik mereka di negara mereka sendiri.

Pemahaman mendalam tentang tantangan integrasi sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh migrasi Rohingya sangat penting bagi negara-negara penerima untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian yang komprehensif dalam domain ini juga dapat memberikan pandangan yang berharga bagi lembaga-lembaga internasional dan organisasi kemanusiaan untuk merancang intervensi yang lebih baik dan lebih berdaya guna dalam mendukung proses integrasi para pengungsi Rohingya. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan terperinci tentang tantangan integrasi sosial dan ekonomi dalam konteks migrasi Rohingya di negara penerima menjadi sangat relevan dan bermanfaat. Dengan memahami faktor-faktor

yang memengaruhi integrasi mereka, akan menjadi lebih mungkin untuk merancang kebijakan dan program yang berfokus pada pemecahan masalah yang spesifik dan pembangunan kapasitas yang tepat, sehingga mendukung proses adaptasi dan keberhasilan jangka panjang bagi komunitas Rohingya dan masyarakat penerima yang lebih luas.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mendalami fenomena migrasi Rohingya dan tantangan integrasi sosial serta ekonomi di negara penerima. Metode deskriptif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan situasi yang kompleks dari sudut pandang yang mendalam dan menyeluruh. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, meliputi kata-kata, gambar, dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang intensif untuk mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang berkualitas dan relevan. Berbagai sumber data tersebut kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk mengungkap pola, tema, dan tren yang muncul terkait dengan migrasi Rohingya dan tantangan integrasi sosial serta ekonomi di negara penerima. Analisis data ini tidak hanya menggambarkan situasi yang ada, tetapi juga bertujuan untuk memahami konteks yang lebih luas di balik fenomena yang diamati.

Hasil analisis dan interpretasi data akan disusun dalam bentuk laporan penelitian yang sistematis. Laporan penelitian ini akan mencakup pengantar yang menjelaskan latar belakang dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka yang menyajikan pemahaman teoretis dan kontekstual, metode penelitian yang digunakan, temuan utama dari analisis data, dan kesimpulan yang menggambarkan implikasi dari temuan tersebut dalam konteks migrasi Rohingya dan integrasi sosial serta ekonomi di negara penerima. Dengan menggunakan metode deskriptif dalam pendekatan kualitatif, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan bermakna tentang kompleksitas fenomena migrasi Rohingya serta membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam menangani tantangan integrasi sosial serta ekonomi yang dihadapi oleh mereka di negara penerima.

RESULT AND DISCUSSION

1. Tantangan Integrasi Sosial Dan Ekonomi Dalam Konteks Migrasi Rohingya Di Negara Penerima

Etnis Muslim Rohingya merupakan salah satu kelompok minoritas di Myanmar yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda dari mayoritas penduduk yang menganut agama Buddha. Jika melihat dari segi fisik dan budaya, etnis Rohingya lebih mirip dengan orang-orang Bangladesh dan India dari pada dengan Suku Bamar, etnis terbesar di Myanmar. Tantangan integrasi sosial dan ekonomi dalam konteks migrasi Rohingya di negara penerima melibatkan sejumlah aspek yang kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi (Bintarawati et al., 2023):

a. Keterbatasan Akses ke Pendidikan dan Layanan Kesehatan: Transmigran Rohingya sering menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak di negara penerima. Faktor seperti bahasa, budaya, dan ketidaktahuan tentang sistem pendidikan dan kesehatan lokal dapat menjadi hambatan dalam mengakses layanan yang dibutuhkan.

b. Diskriminasi dan Stigmatisasi: Transmigran Rohingya sering menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi dari masyarakat lokal di negara penerima. Hal ini dapat menghambat integrasi sosial mereka dan menciptakan ketidaknyamanan serta ketegangan antar-etnis.

c. Keterbatasan Akses ke Pekerjaan dan Mata Pencaharian: Keterbatasan dalam akses ke pasar kerja formal sering menjadi tantangan bagi transmigran Rohingya. Mereka mungkin terbatas dalam hal keterampilan dan pendidikan yang diperlukan untuk bersaing dalam pasar kerja lokal, dan sering kali terpaksa bekerja dalam sektor informal dengan upah rendah dan kondisi kerja yang buruk.

d. Keterbatasan Legal dan Status

Pengungsi yang Tidak Jelas: Banyak transmigran Rohingya berada dalam situasi hukum yang tidak jelas di negara penerima, dengan status pengungsi yang belum diakui secara resmi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menghambat akses mereka ke layanan dasar serta perlindungan yang diperlukan.

e. Tantangan Budaya dan Agama: Perbedaan budaya dan agama antara transmigran Rohingya dan masyarakat lokal di negara penerima dapat menjadi hambatan bagi integrasi sosial yang harmonis. Perbedaan-perbedaan ini sering kali memunculkan konflik, ketegangan, dan kesalahpahaman antar kelompok.

f. Ketidakstabilan Politik dan Kemanusiaan: Negara penerima sering menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam menghadapi arus masuk besar-besaran transmigran Rohingya. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan tidak pasti bagi transmigran, serta memperumit upaya integrasi sosial dan ekonomi mereka.

Melalui pemahaman mendalam tentang tantangan-tantangan ini, dapat dikembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung integrasi sosial dan ekonomi transmigran Rohingya di negara penerima, serta mempromosikan kedamaian, keadilan, dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Tantangan integrasi sosial dan ekonomi dalam konteks migrasi Rohingya di Indonesia sendiri tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga dengan isu ekologi yang mendesak. Meskipun Indonesia menunjukkan solidaritas yang kuat terhadap pengungsi Rohingya, namun pertimbangan ekologi menjadi penting dan memerlukan perhatian serius. Pengelolaan sumber daya alam, dampak lingkungan dari pemukiman baru, dan keseimbangan ekologi di wilayah penerimaan menjadi fokus yang menuntut pertimbangan mendalam (Fierly Hanifa, 2023).

Pengelolaan sumber daya alam di wilayah penerimaan menjadi tantangan utama. Kedatangan ribuan pengungsi menyebabkan peningkatan signifikan dalam kebutuhan akan air, pangan, dan energi. Hal ini berpotensi meningkatkan eksploitasi

sumber daya alam lokal, yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur untuk mengakomodasi pengungsi, seperti pemukiman, sekolah, dan fasilitas kesehatan, juga menjadi perhatian serius. Pembangunan tersebut dapat meninggalkan jejak lingkungan yang signifikan, termasuk kerusakan habitat alami dan penurunan kualitas lingkungan.

Pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk merancang kebijakan yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan manusia, tetapi juga melindungi ekosistem lokal. Langkah-langkah menuju pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya yang bijak, dan perencanaan lingkungan yang hati-hati diperlukan agar solidaritas terhadap pengungsi Rohingya tidak mengorbankan keberlanjutan ekologi Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah dalam menanggapi masalah Rohingya, termasuk melalui diplomasi dengan pemerintah Myanmar dan memberikan bantuan dasar kepada pengungsi. Namun, untuk mengatasi tantangan ekologi yang timbul, kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta diperlukan. Solusi holistik yang mencakup aspek kemanusiaan dan ekologi harus diupayakan untuk menciptakan integrasi yang berkelanjutan bagi pengungsi Rohingya di Indonesia. Dengan kolaborasi yang kuat dan strategi yang terencana dengan baik, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam mengatasi tantangan integrasi sosial, ekonomi, dan ekologi dalam konteks migrasi Rohingya.

2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Integrasi Rohingya

Masyarakat Rohingya di Myanmar sebenarnya tidak bisa disebut 'Etnis' sepenuhnya karena tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah terkait. Berawal hanya sebagai label politis yang digunakan untuk memperjuangkan keberadaan kelompok tersebut di Myanmar. Menurut sejarah, Rohingya disebut sebagai kaum minoritas Muslim yang tinggal di Arakan, namun tidak berjalan dengan

harmonis dan menimbulkan konflik. Pemerintah Myanmar pun menolak mengakui keberadaan etnis Rohingya di Myanmar. Mereka mengatakan bahwa etnis Rohingya bukan penduduk asli Myanmar. Pemerintah juga mengklasifikasikan etnis Rohingya sebagai imigran ilegal, meskipun telah lama tinggal di Myanmar (detikEdu, 2023). Pada Mei 2012, terjadi konflik antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine. Konflik tersebut bermula ketika beredar foto hasil forensik mengenai pembunuhan terhadap perempuan etnis Rakhine pada 28 Mei 2012 yang dilakukan oleh tiga pemuda etnis Rohingya yang membuat Para Biksu dan masyarakat etnis Rakhine membunuh etnis Rohingya, merusak tempat ibadah, mengakibatkan 140ribu terusir dan 800 orang tidak mempunyai kewarganegaraan, 3000 bangunan rusak, dan hampir 60.000 orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke Malaysia, Thailand dan Indonesia (2015).

Menggabungkan informasi dari detikEdu, komunitas Rohingya adalah penduduk wilayah Arakan yang diperintah oleh Raja Suleiman Shah pada abad ke-15. Raja Suleiman Shah, sebelumnya dikenal sebagai Naramaikhla, memerintah sebagai raja Buddhis sebelumnya. Sayangnya, kekuasaan kerajaan ini diambil alih oleh pemerintah Myanmar pada tahun 1784, dan wilayah Arakan kemudian menjadi bagian dari koloni Inggris pada tahun 1824. Periode kolonial ini membawa penderitaan bagi masyarakat Rohingya, dengan penindasan yang terus berlanjut selama penjajahan Inggris dan bahkan saat invasi Jepang ke Burma pada tahun 1942 (Rizal Setyo Nugroho, 2023). Setelah kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, hubungan antara pemerintah dan Rohingya tegang. Masyarakat Rohingya ditolak kewarganegaraannya di Burma dan dihadapkan pada pengucilan yang semakin meningkat. Alasan di Balik Pelarian Rohingya dari Bangladesh (Rosyid, 2019)

a. Kondisi Keamanan yang Buruk

Keadaan keamanan di kamp Cox's Bazar tercatat mengalami kejadian penculikan, pemerasan, pembunuhan, penembakan, dan serangan secara luas. Laporan dari Human Rights Watch tahun 2023 mengungkapkan

bahwa geng kriminal dan kelompok bersenjata Islamis sering menyerang kamp pengungsi, terutama pada malam hari. Menurut data kepolisian Bangladesh, setidaknya 60 orang Rohingya telah tewas di kamp Cox's Bazar dalam setahun terakhir.

b. Kelangkaan Sumber Makanan

Para pengungsi Rohingya mengalami kesulitan mendapatkan sumber makanan yang memadai, terutama setelah Program Pangan Dunia (WFP) memangkas alokasi makanan pada awal tahun ini. Mereka hanya menerima bantuan sebesar 8 dolar atau sekitar Rp124.000 per bulan untuk satu orang, yang sangat minim untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang bergantung pada makanan.

c. Akses Terbatas ke Pekerjaan dan Pendidikan

Pengungsi Rohingya di Bangladesh menghadapi kendala dalam mengakses pekerjaan dan pendidikan. Mereka tidak diizinkan untuk bekerja atau bersekolah secara layak, karena pemerintah Bangladesh tidak menginginkan integrasi mereka ke dalam masyarakat. Selain itu, mereka juga dilarang untuk belajar bahasa Bengali, yang merupakan bahasa utama di Bangladesh. Hal ini membuat mereka semakin terpinggirkan dan sulit untuk memperbaiki kehidupan mereka di negara penampungan tersebut.

3. Kebijakan Dan Program Yang Dilakukan Indonesia Bagi Pengungsi Rohingya

Pemerintah RI dalam berupaya mengatasi persoalan yang diderita etnis Rohingya di Myanmar berupa pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi Rohingya dan upaya diplomatik.

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi Rohingya

Pemerintah Indonesia telah menetapkan dua langkah untuk menangani para pengungsi, seperti yang dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Sosial Khafifah Indar Parawansa pada Minggu, 24 Mei 2015. Rapat tersebut dihadiri oleh Pemerintah Daerah Aceh, UNHCR, International Organization for Migration (IOM), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),

dan LSM. Hasil dari rapat tersebut adalah pertama, 720 pengungsi asal Bangladesh telah dikembalikan ke negara mereka dengan biaya yang ditanggung oleh UNHCR dan IOM. Kedua, pemerintah RI memberikan perlindungan sosial, memenuhi kebutuhan dasar, dan memberikan penanganan trauma kepada pengungsi Rohingya. Dari total 1.759 pengungsi di Aceh, 720 di antaranya berasal dari Bangladesh dan 1.062 adalah pengungsi Rohingya, termasuk 565 laki-laki, 235 perempuan, dan 225 anak-anak (Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023).

Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, ada tiga opsi dalam menangani pengungsi, yaitu diintegrasikan dengan penduduk setempat, dipulangkan ke negara asal, atau dimukimkan di negara anggota Konvensi Pengungsi atau negara non-peserta konvensi yang bersedia menerimanya. Australia merupakan negara anggota konvensi, sementara Gambia bersedia menerima pengungsi. Namun, Australia menolak menampung pengungsi. Pemerintah RI juga belum mengambil langkah atas tawaran Gambia untuk menerima pengungsi, yang dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan UNHCR.

BNPB RI telah diberi tugas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membantu memenuhi kebutuhan pengungsi Rohingya dan Bangladesh di Aceh, yang berjumlah 1.722 jiwa. Langkah awal BNPB adalah mendistribusikan bantuan logistik seperti WC portable, dapur umum, dan alas tidur. PT Ashibu, sebuah Badan Otonom (Banom) NU, juga memberikan bantuan materi dan dukungan moril kepada pengungsi Rohingya. Selain itu, Indonesia juga telah membangun dua sekolah di Myanmar, yang diresmikan pada 21 Januari 2017 oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Pembangunan tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas pendidikan formal, mempromosikan keberagaman, dan menumbuhkan toleransi dan pluralisme di wilayah tersebut.

Menlu RI Retno LP Marsudi juga menyatakan bahwa Indonesia bersama 11 LSM dari berbagai ormas membantu warga Rakhine dengan membagi makanan dan pakaian serta membangun dua sekolah. Program bantuan tersebut diluncurkan

dengan nama Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) dan dioperasikan oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Tujuan utama HASCO adalah mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga Rakhine dan meningkatkan kapasitas publik serta pemulihan.

Dalam upaya membantu pengungsi Rohingya, beberapa lembaga swadaya masyarakat juga telah berkontribusi. Human Concern International (HCI) bekerja sama dengan Rumah Zakat membangun sekolah darurat di Rakhine State, sedangkan MER-C berharap untuk membangun Rumah Sakit Indonesia di wilayah Mraung Bwe, Mrauk U, Provinsi Rakhine. Selain bantuan fisik, donasi bagi pengungsi Rohingya juga difasilitasi melalui beberapa rekening bank, termasuk Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank CIMB Niaga, dan Bank BCA atas nama Yayasan Infaq Dakwah Center. Terdapat juga penggalangan dana melalui situs kitabisa.com dan langsung di kelurahan di Bandung, yang telah berhasil mengumpulkan sekitar Rp 2,2 miliar hingga 8 September 2017. Aksi Cepat Tanggap (ACT) juga membawa 1.000 paket bantuan dari Indonesia untuk disalurkan ke kamp Kanzarpara, Bangladesh (Media Indonesia, 2023).

Selain itu, anggota DPR RI juga memberikan respon positif dengan mengutuk kejahatan kemanusiaan terhadap warga Rohingya di Myanmar dan menyatakan dukungan untuk upaya penyelesaian akar krisis Rohingya. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mendirikan sebuah institusi atas mekanisme pendanaan global untuk pengungsi Rohingya diikuti dengan upaya untuk menyelesaikan akar krisis tersebut.

b. Upaya Diplomasi Pemerintah RI

Dalam upaya mewujudkan politik luar negeri Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip yang mulia, pemerintah Indonesia telah aktif melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar. Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Luar Negeri RI untuk berkomunikasi dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dan Ketua Komisi Penasehat Khusus untuk Rakhine, Kofi Anan, untuk membahas isu Rohingya. Pada tanggal 4 September 2017, Menteri Luar Negeri RI

bertemu dengan berbagai pejabat tinggi Myanmar di Naypyidaw, termasuk Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing, Menteri pada Kantor Presiden, Penasehat Keamanan Nasional Myanmar, Menteri Muda Urusan Luar Negeri, Menlu, dan Penasehat Negara Aung San Suu Kyi (Tri Indriawati, 2023).

Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan pesan dari masyarakat Indonesia dan mengusulkan empat solusi (Formula 4+1) untuk masa depan warga Rohingya, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri dari penggunaan kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua individu di Rakhine tanpa memandang suku atau agama, dan pentingnya membuka akses untuk bantuan kemanusiaan. Indonesia dan ASEAN juga sepakat terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine dengan melibatkan Pemerintah Myanmar, Komisi Internasional Palang Merah (ICRC), dan beberapa pihak lainnya (Sundari et al., 2021).

Menlu RI juga menyampaikan pembentukan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) kepada Aung San Suu Kyi, yang terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan dan telah memberikan bantuan senilai 2 juta dolar AS. Indonesia berhasil memperoleh akses dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin oleh Pemerintah Myanmar bersama ICRC. Indonesia juga berperan aktif dalam meredakan konflik di Myanmar dengan mengutus Menteri Luar Negeri untuk bertemu dengan Aung Sang Suu Kyi. Indonesia berhasil membuka akses bantuan bagi warga Rohingya dan berkomitmen untuk terus membantu krisis kemanusiaan tersebut.

Dalam upaya penyelesaian krisis Rohingya, Menlu RI Retno Marsudi juga melakukan kunjungan ke Bangladesh untuk membahas bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya dan mendesak pemerintah Bangladesh untuk melindungi para pengungsi yang berada di perbatasan. Namun, upaya diplomasi ini tidak berjalan tanpa hambatan. Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta dilempari bom pada 7 September 2017, sehingga memicu protes dari pemerintah Myanmar. Di Jakarta, sekitar

3.000 anggota ormas Islam melakukan demonstrasi di depan kedubes Myanmar untuk menuntut Myanmar menghentikan kekerasan terhadap Rohingya di Rakhine(Sundari et al., 2021). Meskipun demikian, upaya diplomasi terus dilakukan oleh Indonesia, termasuk melalui konferensi tingkat tinggi dan pertemuan bilateral dengan negara-negara terkait untuk membantu penyelesaian krisis Rohingya di Myanmar.

CONCLUSION

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh transmigran Rohingya dalam memperoleh integrasi sosial dan ekonomi di negara penerima. Secara khusus, tantangan-tantangan seperti keterbatasan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, diskriminasi, keterbatasan akses ke pekerjaan, status pengungsi yang tidak jelas, perbedaan budaya dan agama, serta ketidakstabilan politik dan kemanusiaan menjadi fokus utama. Penyelesaian yang holistik dan berkelanjutan membutuhkan pemahaman mendalam tentang tantangan-tantangan ini.

Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam menanggapi krisis Rohingya dengan berbagai langkah, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pembangunan infrastruktur, bantuan kemanusiaan, dan upaya diplomasi dengan negara-negara terkait. Namun, pentingnya juga ditekankan pada aspek lingkungan dan ekologi, mengingat dampak yang signifikan dari pemukiman baru terhadap sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem di wilayah penerimaan.

Kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mengatasi tantangan integrasi sosial, ekonomi, dan ekologi dalam konteks migrasi Rohingya. Solusi holistik yang mencakup aspek kemanusiaan dan ekologi harus menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan integrasi yang berkelanjutan bagi pengungsi Rohingya di Indonesia. Dengan kolaborasi yang kuat dan strategi yang terencana dengan baik, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam menanggapi tantangan kompleks ini dan memberikan kontribusi positif bagi perdamaian, keadilan,

dan keberlanjutan.

Sebagai penutup, penting bagi semua pihak terlibat untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam menanggapi tantangan integrasi sosial, ekonomi, dan ekologi yang dihadapi oleh transmigran Rohingya. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk memperkuat integrasi sosial melalui pendekatan inklusif, memberikan akses yang adil terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan, serta mengurangi stigma dan diskriminasi. Di samping itu, perlunya fokus pada keberlanjutan lingkungan dan ekologi dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam agar tidak mengorbankan lingkungan lokal.

Kolaborasi lintas-sektoral dan lintas-lembaga menjadi kunci dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama secara erat untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi kebutuhan manusia sambil melindungi ekosistem lokal. Selain itu, upaya diplomasi dan kerjasama internasional juga penting untuk menyelesaikan akar masalah krisis Rohingya di negara asal mereka. Dengan tekad bersama dan kerja sama yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, berkelanjutan, dan damai bagi transmigran Rohingya di Indonesia serta memperkuat peran Indonesia sebagai pelopor dalam menanggapi tantangan kemanusiaan dan ekologi di tingkat global.

REFERENCE LIST

- Airlangga, E. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Rohingya Yang Berada Di Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Fatwa Hukum, [Online] 1(2)*. Available At: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/25366> [Accessed 9 Feb. 2024].
- Bintarawati, F., Lubis, A. F., Iqsandri, R., Utama, A. S., & Walisongo, U. I. N. (2023). Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat. *02(12)*, 1169–1180.

- Fauzan Alamari, M. (2020). Imigran Dan Masalah Integrasi Sosial. *Jurnal Dinamika Global*, 5(2), 254–277.
- Fierly Hanifa (2023). Pengungsi Rohingya, Solidaritas, dan Tantangan Ekologis. [online] detiknews. Available at: <https://news.detik.com/kolom/d-7096093/pengungsi-rohingya-solidaritas-dan-tantangan-ekologis> [Accessed 9 Feb. 2024].
- Fitriyadi, A. A., & Latukau, F. (2020). Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement. *Jambura Law Review*, 2(2), 120–138. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5400>
- Ikapi, A., & Parthiana, I. W. (2015). Hukum Pidana Internasional.
- Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2023). Siaran Pers. [online] Available at: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespon-kondisi-pengungsi-rohingya> [Accessed 9 Feb. 2024].
- Media Indonesia (2023). Nestapa Pengungsi Rohingya. [online] EpaperMI. Available at: <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/nestapa-pengungsi-rohingya> [Accessed 9 Feb. 2024].
- Nasution, F. H. (2016). Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya yang Berada di Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, Vol. 4.
- Rizal Setyo Nugroho (2023). Asal-usul Etnis Rohingya dan Kenapa Mengungsi dari Myanmar dan Bangladesh? Halaman all - Kompas.com. [online] KOMPAS.com. Available at: <https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/16/143000065/asal-usul-etnis-rohingya-dan-kenapa-mengungsi-dari-myanmar-dan-bangladesh?page=all> [Accessed 9 Feb. 2024].
- Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 613. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190>
- Sundari, R., Prayuda, R., & Venita Sary, D. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar. *Jurnal Niara*, 14(1), 177–187. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6011>
- Tri Indriawati (2023). Peran Indonesia dalam Konflik Etnis Rohingya dan Myanmar. [online] KOMPAS.com. Available at: <https://www.kompas.com/stori/read/2023/>